

KOTA BARU DAN ASPEK PERMUKIMAN MENDEPAN

Zubair Batudoka *

Abstract

About twoThird part of a town is housing and settlement, hence it's development orientation should be observed, especially for a new town. Orientation toward its inhabitant's prosperity with the support of good quality infrastructure will push the town growth. Local characteristics represent the important asset which can entirely come up along with the spirit of "otonomi daerah". A New Town can be perceived as a land development project which it's area is able to provide a complete and integral urban elements which include housing, public facility, commerce and industry. Empowerment pattern rely on the community in the form of participation should become a real framework in a development of quality of housing and settlements. Early involvement of the society can support the sustainability development because of the high sense of ownership and caring to its own environment

Keywords: New town, settlement

Abstrak

Dua pertiga bagian kota adalah perumahan dan permukiman, karenanya arah perkembangan kota perlu dicermati, khususnya bagi kota baru. Orientasi terhadap kesejahteraan pemukimnya dengan dukungan infrastruktur yang bermutu pada gilirannya akan mendorong perkembangan kota. Kekhasan lokal merupakan aset penting yang dapat tampil secara utuh sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kota Baru dapat dipahami sebagai sebuah proyek pengembangan lahan yang luasannya mampu menyediakan unsur-unsur perkotaan secara lengkap dan utuh, yang mencakup tempat tinggal (perumahan), fasosum, perdagangan dan industri. Pola pemberdayaan/bertumpu pada masyarakat dalam bentuk partisipatif harus menjadi dasar kerja yang nyata dalam pengembangan mutu perumahan dan permukiman. Penyertaan masyarakat sejak awal dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap lingkungannya sendiri yang lebih tinggi.

Kata kunci: Kota baru, Permukiman

1. Pendahuluan

Abad XXI disebut abad perkotaan (*the urban age*) yang menawarkan beragam peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi secara bijak. Kota pada dasarnya adalah permukiman dengan kompleksitas yang berbeda dan beragam, ciri lain dari kota adalah kebebasannya, menjadi global hampir tidak terkontrol oleh pemerintah pusat, terutama dalam kegiatan ekonomi, sehingga menjadikannya *economic city state*. Kota harus dipahami sebagai permukiman yang berkembang lanjut untuk memenuhi kehidupan dan

penghidupan warganya. Hanya di kota yang berkembang baik warga dapat memajukan diri karena dukungan sarana dan prasarana yang bermutu. Sebagian besar (dua pertiga) kota adalah perumahan dan permukiman, khususnya melayani penduduk lapis menengah ke bawah.

Permukiman dan prasarana wilayah di era reformasi dan otonomi daerah hingga kini belum disertai dengan perubahan mendasar dalam konsep guna menyelesaikan masalah perbaikan mutu dan keadaan perumahan dan permukiman. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan *top-*

* Staf Pengajar Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

down dan sentralistik yang masih mewarnai kebijakan maupun program pemerintah di bidang perumahan dan permukiman..

Perencanaan kota baru kedepan perlu memperhatikan perkembangan kota dalam berbagai skala dan kepentingan. Dalam aspek perumahan dan permukiman kekhasan lokal (*local identity*) yang dimiliki oleh daerah setempat merupakan aset yang pantas disertakan secara utuh dimasa depan. Hal lainnya yang mendasar dan perlu diperhatikan adalah mengembalikan lagi kedudukan perumahan dan permukiman ke *domain privat* seperti sebelum ini digeser ke *domain publik* akibat dominasi ekonomi yang berlebihan (Silas, 2002).

2. Metode Penulisan

Tulisan ini disusun berdasarkan telaah pustaka yang membahas berbagai aspek mengenai Permukiman dan Kota Baru. Tahapan penulisan dimulai dengan persiapan, pengkajian literatur yang dikumpulkan dan penyusunan tulisan. Ulasan dalam tulisan ini diadaptasi dari berbagai sumber serta kajian dan konsep/gagasan berdasarkan pemahaman dan pengalaman penulis maupun hasil diskusi laboratorium studio dengan sejawat.

3. Kajian Pustaka

3.1 Kota baru

Ide awal kota baru mengemuka sekitar awal abad ke sembilan belas. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial masyarakat yang memburuk dari perkembangan industri di Zaman Victoria. Saat ini tuntutan pengembangan kota baru telah bergeser, dengan demikian nnnnnnnnnkonsepsi Kota Baru dalam perkembangannyapun akan terus mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Pelopor utama idea Kota Baru adalah Ebenezer Howard (1850-1928), melalui konsep Garden City (kota-taman), tetapi Howard bukanlah satu-satunya reformis sosial yang

menganggakan suatu lingkungan kota yang ideal. William Morris, Thomas More, John Ruskin (Stephen V Ward, 1992), merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran tentang reformasi sosial masyarakat kota.

Harvey S. Perloff dan Neil C.Sandbery dalam bukunya *Why and For Whom* (1973:3-12) mengungkapkan pengertian Kota Baru sebagai Kota yang dirancang dan direncanakan untuk bisa "mandiri" dengan ukuran luas yang relatif kecil dalam komunitas yang seimbang. Pengertian mandiri yang dimaksud adalah (1) Fasilitas kota yang direncanakan mempunyai peluang pekerjaan yang mencukupi, fasilitas perdagangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya terletak dalam jarak yang relatif dekat sehingga mudah dijangkau, (2) Kota baru dapat memberikan suasana lingkungan kehidupan yang kondusif untuk komunitas/ masyarakat kota tersebut. Pengertian seimbang mempunyai arti bukan saja keseimbangan kesempatan kerja, penduduk, industri, perdagangan, rekreasi dan fasilitas hunian, tetapi juga mengandung pengertian seimbang dalam kelompok umur, pendapatan, pekerjaan, etnik, serta komposisi kelas/status sosial masyarakat.

Menurut Campbell C.C dalam *New Town Another Way to Live* (1976:18) ide utama dalam konsep kota baru adalah untuk membentuk suatu rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu, untuk mencapai keseimbangan, kebutuhan fasilitas penduduk, menentukan batas pertumbuhannya di samping menghubungkan fungsi guna tanah yang berbeda dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa idea atau jiwa perencanaan sebuah Kota Baru adalah menciptakan suatu lingkungan kehidupan masyarakat yang baik secara fisik maupun non fisik dapat menunjang perikehidupan masyarakat kota secara mandiri, seimbang, serta harmonis.

Kota Baru dapat dipahami sebagai sebuah proyek pengembangan lahan yang luasannya mampu menyediakan unsur-unsur perkotaan secara lengkap dan utuh, yang mencakup tempat tinggal (perumahan), fasosum, perdagangan dan industri, yang secara keseluruhan dapat memberikan :

- Kesempatan untuk hidup dalam lingkungan tersebut
- Jenis dan harga rumah yang beragam
- Ruang terbuka aktif dan pasif serta *buffer zone* (penyangga)
- Program dan kegiatan pengendalian lingkungan fisik
- Biaya investasi relatif besar. (Eko Budi Santoso, 2001).

Kota baru direncanakan, dibangun dan dikembangkan dari kota yang sebelumnya telah tumbuh dan berkembang. dimana konsentrasi penduduk relatif kurang. Sebagai kota baru penunjang (*supporting new town*) perencanaan dan pembangunannya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi permukiman atau kota kecil disekitar kota induk. Pada gilirannya kota baru tersebut diharapkan menjadi kota mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dan kegiatan usaha bagi penduduknya. Secara sosial dan ekonomis Kota Baru masih tergantung pada kota induknya (75-90 %).

Menurut Wikantyoso (2001), pengaturan guna lahan untuk mencapai kemandirian dalam keseimbangan diperlukan konsep *mix used* antara fungsi hunian, perdagangan, tata hijau perkantoran dan fungsi lainnya. Keseimbangan guna lahan memungkinkan keseimbangan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dengan meminimalkan pergerakan dari dan ke kota utama. Kemandirian dalam keseimbangan dalam perencanaan kota baru memperjelas bahwa pembangunan kota baru bukanlah untuk mewadahi komunitas masyarakat dalam satu klas sosial atau satu fungsi, tetapi dituntut heterogenitas sosial dan fungsi sebagaimana komunitas kota

utama. Struktur pekerjaan dan komposisi perumahannya haruslah diperuntukan bagi kelompok sosial-ekonomi dan aktivitas ekonomi yang bercampur. Sehingga secara umum kota baru haruslah dilihat sebagai pembangunan berbagai unit fungsi yang bukan saja untuk perumahan dan fasilitas perdagangan tetapi juga fasilitas kerja, pendidikan, rekreasi, kesehatan dan lain-lain.

Dalam perkembangannya kota baru ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ; faktor sosial yang meliputi kependudukan dan kualitas kehidupan masyarakat, faktor ekonomi yang meliputi kegiatan usaha dan politik ekonomi, faktor lahan meliputi pola penggunaan lahan dan harga lahan serta faktor pengelolaan pembangunan yang meliputi kelembagaan dan kemitraan.

Konsentrasi manusia di perkotaan menimbulkan masalah yang kompleks pada permukiman dan lingkungannya; seperti masalah-masalah kesehatan lingkungan, energi dan transportasi, air bersih dan pengelolaan limbah domestik.(Happy Santosa, 2000). Pada Kota Baru permasalahan tersebut dapat dikendalikan melalui perencanaan yang baik. Dengan demikian komunitas yang bermukim di kota baru dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidupnya.

Sebenarnya kita berumah selalu bersama dengan orang lain dalam sebuah komunitas permukiman. Tidak ada atau jarang sekali orang bermukim bebas dari kesatuan seperti itu. Pembangunan permukiman baru pun sudah pernah berlangsung di masa lalu dalam masyarakat kita misalnya, dapat dijumpai nama-nama tempat seperti Kampung Baru, Kotabaru, Ujung Pandang Baru dan lain-lain yang memperlihatkan bahwa dulunya tempat mereka itu adalah pembangunan baru.

3.2 Kota Abad XXI

Ciri kota abad XXI harus dipahami karena secara langsung akan

mempengaruhi keberadaan dan perkembangan perumahan dan permukimannya. Beberapa ciri khas kota abad XXI adalah

- Globalisasi dan informasionalisasi
- Tertierisasi dan industri berbasis intelektual
- Pluralisasi dan dislokasi
- Pembinaan sosial dan lingkungan yang pekat
- Mengemban tugas lama seperti prestasi kultur dalam arti luas, konsentrasi beragam dari kegiatan dan fasilitas, terus melestarikan kekhasan lokal, dan sebagainya. (Silas, 2002)

Tantangan abad XXI meliputi; pencapaian standar perumahan dan permukiman yang baik dan meningkat, perumahan dan permukiman yang bernilai dan maju (*urbanized*) dan berkelanjutan, sebagai modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi warga perlu teragenda, terkait secara global tanpa menghilangkan kekhasan lokal serta pengembangan perumahan dan permukiman yang mandiri.

3.3 Perumahan dan Permukiman

Dalam UU RI No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman disebutkan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan sedang permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan dimana tujuan penataannya adalah untuk; memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional dan menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya serta bidang lain-lain.

Selanjutnya disebutkan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman Untuk permukiman tujuannya ditegaskan untuk ; menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman dan mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada didalam atau sekitarnya.

3.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Permukiman

Dalam penyertaan masyarakat pada pembangunan perumahan dan permukiman dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman dimana pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Johan Silas dalam *Housing Beyond Home* (1993), bahwa konsep perumahan di Indonesia intinya adalah : Perumahan yang dikembangkan oleh pihak yang membutuhkan dengan segala konsekwensinya. Dasar perumahan ini adalah perkembangan yang berdimensi majemuk (*multi dimensional development*) jauh lebih lengkap dari sekedar tempat hunian saja. Dengan sendirinya yang juga dihadapi adalah skala kumpulan rumah mulai sekedar perumahan hingga permukiman yang lebih lengkap.

Pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia diprogramkan sebagai tanggung jawab masyarakat sendiri yang diselenggarakan secara multi sektoral dengan menempatkan pemerintah sebagai pendorong dan

fasilitator dalam upaya memungkinkan masyarakat dan peran aktif dunia usaha. Bidang perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai permasalahan fisik semata, namun harus dikaitkan dengan masalah sosial, ekonomi serta budaya masyarakat secara berkeadilan, harmonis dan berkelanjutan. Sasaran akhir pembangunannya adalah terwujudnya kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengelola perumahan dan permukiman secara mandiri. Pada penyelenggaraan perumahan dan permukiman, dilaksanakan secara terdesentralisasi dalam rangka otonomi daerah, mengharuskan seluruh pelaku pembangunan menyamakan persepsi, pola pikir dan langkah kegiatan yang diselenggarakan setiap daerah serta kesiapan kelembagaan yang harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama

3.5 Konsep Perumahan dan Permukiman

Selanjutnya konsep perumahan dan permukiman di Indonesia juga mengacu pada agenda perumahan dan permukiman sebagaimana yang tercantum dalam salah satu Agenda 21/ Habitat Agenda yang menetapkan pentingnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman sebagai salah satu bagian pokok dari pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi setiap orang melalui pelaksanaan strategi pemberdayaan. Hal ini ditegaskan dalam arahan GBHN dan Propenas Tahun 2000-2004 bahwa ; Perumahan selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat awal pengembangan kehidupan serta penghidupan keluarga adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dan terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Menurut John. F.C. turner (1972) dalam *Freedom to Built* rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekaligus tetapi merupakan sebuah proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas ekonomi penghuninya dalam kurun waktu tertentu. yang terpenting dari rumah adalah dampak terhadap penghuni, bukan wujud dan standart fisiknya.

Dalam Habitat Agenda dikemukakan bahwa peningkatan kualitas permukiman dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Selanjutnya dikemukakan bahwa tempat tinggal yang layak meliputi fisik bangunan, aksesibilitas, dan jaminan serta ketersediaan sarana. Sedang kebijaksanaan yang ditujukan untuk membuat perumahan menjadi nyaman dihuni, terjangkau dan bisa diakses, dapat ditempuh dengan jalan :

- Memperluas suplai perumahan yang terjangkau melalui insentif pasar dan tindakan peraturan yang tepat ; Peningkatan keterjangkauan melalui penyediaan subsidi dan sewa dan bentuk-bentuk lain.
- Mendukung program-program perumahan yang dihuni pemilik dan sewa nirlaba dan koperasi yang berbasis komunitas.
- Penggalakan layanan-layanan pendukung bagi orang-orang gelandangan dan kelompok-kelompok yang rentan
- Memobilisasi sumber daya finansial inovatif dan sumber daya lain-- publik/pemerintah dan swasta, untuk pengembangan/pembangunan komunitas dan perumahan.
- Penciptaan dan penggalakan insentif berbasis pasar untuk mendorong sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan atas perumahan yang dihuni pemilik dan sewa yang terjangkau.

Penggalakan pola pengembangan ruang yang bisa

dipelihara dan sistem transportasi yang memperbaiki aksesibilitas barang-barang, jasa, fasilitas dan pekerjaan

3.6 Sarana dan Prasarana Permukiman

Permukiman berkembang bermula dalam lingkup yang lebih kecil. Pada awalnya manusia membuat rumah sebagai tempat untuk berlindung. Dari rumah ini timbul perumahan yang dihuni keluarga-keluarga. Perumahan yang dari banyak rumah ini kemudian berkembang dan melengkapi diri dengan sarana seperti sarana-sarana sosial, pendidikan, pemerintahan, keagamaan, olah raga, bermain anak, kesehatan, perekonomian dan prasarana lingkungan seperti jalan-jalan lingkungan dan jalan akses, saluran pematuan, tempat sampah, jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Maka timbullah suatu permukiman. Selanjutnya permukiman tersebut akan bersinggungan dengan lingkungan alam, lingkungan binaan dan lingkungan sosial, yang dapat berbentuk kawasan-kawasan tertentu. Misalnya kawasan pesisir (lingkungan alam), kawasan industri (lingkungan buatan) dan kawasan permukiman lain (lingkungan sosial). Tampak bahwa permukiman yang baik memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pada perencanaan kota baru kebutuhan akan sarana dan prasarana dapat diprioritaskan untuk dapat memberi stimulan bagi keberlangsungan dan perkembangan perumahan dan permukiman.

Sarana dan prasarana permukiman merupakan aspek penting. Bagaimanapun, sebuah permukiman baru tidak dapat mengabaikan keberadaan lingkungan sekitarnya, baik sebelum maupun sesudah perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Poerbo (1986), sebuah lingkungan permukiman merupakan hasil dari proses-proses interaksi manusia dengan lingkungannya, karena manusia mempunyai akal budi, yang dilandasi

oleh nilai norma dan membentuk struktur pranata sosial, ekonomi dan budi daya untuk memanfaatkan lingkungan alam buat menopang kehidupan bersamanya dengan menciptakan lingkungan buatan seperti membangun jalan, sekolah, sanitasi, tempat ibadah dan sebagainya. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Sugandhy (1991), bahwa Suatu permukiman adalah lingkungan perumahan atau hunian yang terdiri dari kumpulan bangunan rumah dengan berbagai fasilitasnya, antara lain, jaringan jalan, saluran-saluran kotor, saluran air hujan, kualitas udara bersih, MCK, tempat bermain lapangan terbuka, pusat lingkungan dengan fasilitas pasar, sekolah dan lain-lain yang didesain perunit lingkungan atas dasar struktur yang hirarkis atau *multiple-use*.

3.7 Kondisi Fisik Hunian

Sixsmith (1986) sebagaimana yang dikemukakan Turner (2001), mengidentifikasi aspek-aspek kunci rumah fisik itu sebagai; struktur, layanan bangunan, arsitektur, lingkungan untuk aktivitas dan spasialitas. Sedang Rapoport (1969) menekankan kekuatan yang memberi bentuk dan karakter identitas dari penghuni dan memberi batasan pada ruang serta termasuk di dalamnya apa yang dibuat manusia sejak mulai membangun dan mencari beberapa bentuk maupun tipe rumah sampai pada penyebab terjadinya hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap bentuk-bentuk yang menentukan hunian secara tidak langsung memberi penghuninya bekal pengetahuan dikemudian hari. Faktor penentu bentuk rumah antara lain; iklim, teknologi bahan bangunan, lokasi, pertahanan, ekonomi dan kepercayaan.

Seperti yang tampak pada permukiman pascarelokasi kondisi fisik hunian umumnya memiliki karakteristik yang sama (tipikal) dimana unsur teknologi dalam pembangunan dengan bahan bangunan dasar yang sama (konstruksi tiang utama dan atap)

serta tata masa bangunan secara fisik pada kondisi awal menghasilkan bentuk yang relatif sama.

3.8 Aspek Non Fisik Permukiman

Rumah Sebagai citra diri (Cooper, 1972 ; Amiranti 2002), *self* dipresentasikan dengan simbol fisik, dimana *body* manifestasi dari pelindung *self* yang pertama dan paling disadari oleh manusia dan *home* sebagai proteksi dasar lingkungan internal diluar kulit manusia dan bajunya. Sedang Sixmith (1986) mengutip James (1982) seperti yang dikemukakan Turner (2001), bahwa dimensi personal rumah itu adalah suatu perluasan dari "I" *self* dan "me" *self*. "I" *self* , atau *self* subjektif, diekspresikan dalam emosi-emosi seperti misalnya kesenangan/kebahagiaan dan rasa memiliki, respon afektif, seperti misalnya *privacy*. "Me" *self* pada sisi lain di dasarkan dalam ekspresi diri sendiri, pengalaman asosiatif dan formatif yang kritis, persepsi tentang permanensi, perspektif waktu (masa lalu, masa sekarang dan masa depan) dan arti dan pengetahuan tentang tempat. Sixmith mencatat variabel-variabel berikut sebagai indikasi rumah pribadi ; kesenangan, kepemilikan, ekspresi diri, pengalaman kritis, kepermanenan, *privacy*, pengetahuan dan kehendak untuk kembali.

Bagi banyak masyarakat Indonesia terutama golongan menengah ke bawah, rumah juga merupakan barang modal, karena dengan aset rumah ini mereka dapat melakukan kegiatan ekonominya. Pembangunan perumahan diyakini dapat mendorong lebih dari seratus macam kegiatan industri lainnya, sehingga sangat potensial dalam menggerakkan roda ekonomi dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif.

Hal lain yang berkaitan dengan aspek non fisik adalah kebudayaan hal mana merupakan sebuah batas proses interaksi dinamis antar manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dengan dunia materi nyata dalam kompleks ide-idenya (Rapoport, 1985)

lebih rinci diuraikan Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (1982), bahwa budaya terdiri dari unsur-unsur kebudayaan yang universal (*cultural universals*). Unsur-unsur tersebut mencakup bahasa, sistem pengetahuan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi serta sistem mata pencaharian, religi dan kesenian. Keseluruhan unsur tersebut selalu mempunyai perwujudan fisik. Terdapat tiga wujud kebudayaan yaitu *cultural system* berupa sistem nilai, norma dan perangkat aturan; *social system* yang merupakan suatu aktivitas manusia secara holistik dan *physical system* yang berupa benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1982). Arsitektur sebagai wujud fisik kebudayaan merupakan hasil dari kompleksitas gagasan sebagai kesatuan sistem budaya, dan tercermin dalam keseluruhan sistem sosial masyarakat.

Poerwanto, (2000) lebih melihat kepada sejauh mana kebudayaan yang dimiliki oleh suatu komunitas dipakai sebagai suatu strategi adaptasi dalam menghadapi suatu lingkungan biogeofisik tertentu sehingga ia tetap mampu melangsungkan kehidupannya, selanjutnya mengutip Spradley (1972) dikemukakan bahwa proses adaptasi juga dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi seseorang terhadap suatu obyek, yang kemudian menuju pada sistem kategorisasi dalam bentuk respon atas kompleksitas suatu lingkungan yang sesuai untuk di adaptasi, memberikan arah bagi perilaku mereka sehingga memungkinkan dapat mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang akan datang.

Menurut Pedro Arupe dalam Eko Budiharjo (1988), rumah bukan hanya sekedar bangunan tetapi merupakan suatu konteks atau hubungan sosial dari suatu keluarga. Sedang Irwin Altman (1989) melihat rumah sebagai refleksi dari hubungan antara kebudayaan dan lingkungan. Tampak bahwa peran kebudayaan dalam membentuk akan terlihat jelas dari keterlibatan segi-segi budaya tersebut yakni kosmologi, agama serta struktur keluarga dan struktur sosial dan sebaliknya rumah akan merefleksikan

berbagai segi atau nilai-nilai kebudayaan ini. Lingkungan binaan ditentukan oleh kelompok dan dapat berubah karena budaya, jadi budaya memegang peranan sentral dalam lingkungan binaan.

Tapak permukiman cenderung berpengaruh terhadap pola interaksi sosial penduduknya, dimana elemen jalan atau ruang terbuka cenderung paling berpengaruh (Vasthu, 1988; Bhatt, 1990). Ruang-ruang terbuka merupakan ruang '*multi function*', namun fungsi utama merupakan wadah kegiatan interaksi sosial sekaligus sebagai wadah kegiatan perekonomian (Guinness, 1986). Keaktifan dan interaksi sosial secara positif mempengaruhi semua tatanan elemen tapak permukiman, sehingga makin lama tinggal di permukiman tersebut dan makin homogen latar belakang penduduk dan sosial ekonominya, maka pengaruh tatanan tapak permukiman terhadap pola interaksi sosial penduduknya cenderung lebih besar. Sementara itu menurut Altman (1984) lokasi perumahan dan tempat kerja merupakan aspek lain dari *urban design* yang berhubungan dengan perekonomian. Sejalan dengan hal itu Turner menyebutkan bahwa penduduk yang berpendapatan rendah cenderung memilih rumah yang transportasi menuju tempat kerja mudah dan harga rumah yang layak terjangkau.

Menurut Setioko, B (1997) Dari sejarah perkembangan penyebaran lokasi permukiman penduduk dan kualitas artefaknya yang berupa gugusan kelompok permukiman dapat diidentifikasi pasang surutnya satu kelas sosial dalam menghadapi kelas sosial lain. Dimana kelas sosial yang tidak mampu bertahan akan hilang eksistensinya dalam kota. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam perencanaan kota hendaknya mengikuti perkembangan dan memperhatikan potensi kota untuk kemudian bisa bersikap realistis, secara kebutuhan, *reasonable*, secara ekonomi *feasible* dan secara sosial *adaptable*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Setha dan Altman (1992) bahwa keterikatan terhadap tempat dapat terkoyak oleh karena beberapa sebab yaitu; *Homelessness, relocation, mobility, crime, community development, human emotion about places (stress, alination, loss of rootness to places)*.

3.9 Permukiman Berkelanjutan

Perencanaan dan pengembangan kota baru dapat berlangsung sebagaimana yang diarahakan untuk jangka waktu yang lama jika memperhatikan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Kata *sustainable* menurut Kenneth Hagard dalam Wiseso(2000), menggambarkan perubahan sosial dan kebudayaan dalam tatanan dunia , pola dan gaya hidup. Istilah yang mulai digunakan era tahun 1970an ini dijadikan kata kunci dalam setiap permasalahan yang menyangkut daya dukung lingkungan. Dalam Agenda 21 diisyaratkan tentang pembangunan permukiman yang berkelanjutan di dunia yang makin mengkota. Arah Agenda 21 harus diikuti secara konsekuen, agar permukiman dapat berlanjut dan mensejahterakan manusia. (Happy Santosa, 2000) demikian halnya yang dikemukakan oleh Poerbo, (1999), bahwa pembangunan berkelanjutan hendaknya disertai dengan menghilangkan kemiskinan sebagai salah satu sumber perusakan lingkungan, sehingga pembangunan harus diikuti dengan pemerataan atau pembangunan yang berkeadilan (*development with equity*)

Menurut kutipan *United Nation World Comission* pada *Environment Conference* tahun 1986 mengenai pembangunan berkelanjutan adalah : "*development which meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*" (Gro Harlem Brundlant ,1986) sejalan dengan hal tersebut Menurut Komarudin, (1997) Pembangunan perumahan berkelanjutan adalah pembangunan

perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masa kini maupun masa depan secara merata, dimana model pembangunan ini berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek sosial-ekonomi, politik, budaya, falsafah, hukum dan perundang-undangan. Dian Conyers (1986), dalam Komarudin (1997) menegaskan bahwa pembangunan perumahan berkelanjutan memperhatikan perencanaan sosial yang mencakup pelayanan sosial, partisipasi masyarakat, organisasi dan metode informasi, ketrampilan dalam perencanaan, komunikasi dan manajemen. Sedang menurut Silas (2002) konsep *sustainability* bersifat dinamis dimana untuk permukiman mengandung prinsip keseimbangan, konservasi energi, *renewable technology*, membangun untuk waktu yang selama mungkin, *traffic*, *proximity* dan pengelolaan sampah yang tepat.

3.10 Kota Kita

Yang mendorong terjadinya urbanisasi adalah dorongan kuat untuk meninggalkan desa, di samping memang kota sendiri menariknya. Menurut perhitungan ekonomis mereka, dan itu nyata, tinggal di desa berarti pemerosotan dan pemiskinan. Namun ternyata tinggal di kota yang memadat dan memekar tanpa ada kesanggupan mencukupi dengan infrastruktur itu pun hanya menempatkan mereka di sektor informal. Kehadiran sektor informal di kota tak pelak menjadi perhatian penting, karena aktivitas di sektor ini memberi sumbangan besar pada ekonomi nasional, karenanya harus diakui adanya.

Sementara itu kondisi kota kita pun sebenarnya mewarisi apa yang dikerjakan orang pada masa kolonial. Kota-kota kita adalah tersusun atas banyak pusat-pusat pertumbuhan sebagai pengembangan dari kawasan Pecinan, Arab, Melayu, Eropa yang dibuat penjajah dulunya. Berbeda dengan kota Barat yang bertumbuh dari pusat yang satu, kota kita tersusun atas 'kampung-kampung' yang

melanjutkan tradisi bermukim pedesaan dari mana mereka semula berasal. Karena itu pendekatan yang gayut dengan permukiman mereka adalah pendekatan yang masih memungkinkan suasana kampung tadi dalam permukiman barunya. Hasil *global dialogue* tentang *Rural-Urban Linkages* (Hannover Expo 2000) melihat hubungan antara kota dan desa yang saling terkait sehingga dapat saling memberi keuntungan.

Pluralisme dan berbagai ekspresi pribadi yang berkesan 'meriah' dalam bermukim tidak seharusnya dinilai sebagai kekumuhan, yang lalu harus disingkirkan dengan menciptakan kebakaran (karena cara pengusuran hanya akan memancing wartawan). Konsep 'bersih' dan 'tertib' yang diberlakukan oleh Penguasa rupanya tidak bertolak dari konsep yang sudah dipunyai dalam tradisi, bukan dominasi namun interdependensi. Ada beberapa hal penting dari kampung yang bisa dikembangkan untuk permukiman di kota :

- Kota dan Kampung memiliki relasi ekonomik yang saling menguntungkan. Para penghuni kampung kota bekerja di kota, entah di sektor formal atau informal.
- Sektor informal melengkapi, bahkan meramaikan sector formal

Struktur sosial kampung menjadi menentukan layout fisik kampung.

4. Catatan Penutup

Dalam perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman mendepan tidak saja harus lebih maju, tetapi mampu menghadirkan kelebihan berupa kekuatan lokal dalam bentuk kekhasan daerah. Dalam hal ini arsitektur tradisional yang berkembang di semua tempat hendaknya dijadikan modal dasar awal untuk mencapai arsitektur perumahan dan permukiman yang maju mengikuti tantangan zaman.

Pola pemberdayaan/bertumpu pada masyarakat dalam bentuk partisipatif harus menjadi dasar kerja yang nyata dalam pengembangan

mutu perumahan dan permukiman. Penyertaan masyarakat sejak awal dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap lingkungannya sendiri yang tinggi. Dinamika perkembangan kota menyertakan proses transformasi. Wajah kota kita kelak akan seperti apa sangat bergantung dengan "perlakuan" kita saat ini. Kemana pun kota akan berkembang, interpretasi baru atas kultur bermukim kita masih gayut untuk dilakukan. Fisik mungkin lain, wajah pasti lain, tapi pada permukiman dalam kota baru mendatang semoga kita masih bisa mengakrabi lingkungan dan komunitas dimana kita bermukim dan melangsungkan aktivitas keseharian, semoga

5. Pustaka Rujukan

- Altman, Irwin and Martin Chemers (1980) *Culture and Environment*, Wadsworth, Inc, California.
- Amiranti, S. (2002), *Kertas Kerja Manajemen Aspek Non Fisik dalam Perkembangan Pemukiman*, PPs-Arsitektur, Perumahan & Pemukiman, ITS, Surabaya.
- Budiharjo, E. (1997), *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Guinness, (1986), *Harmony and Hierarchy in Javanese Kampung*, Oxford University Press.
- Happy Santosa (2000), *Permukiman Dan Lingkungan dalam pengembangan Wilayah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Bidang Permukiman dan Lingkungan Jurusan Arsitektur, FTSP, ITS, Surabaya.
- Koentjaraningrat (1982), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komarudin (1996) *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan Realesatad Indonesia, PT Rakasindo, Jakarta.
- Poerbo, H (1999), *Lingkungan Binaan Untuk Rakyat*, Yayasan Akatiga, Bandung.
- Poerwanto, H. (2000), *Kebudayaan dan Lingkungan, Dalam Perspektif Antropologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rapoport, A (1969), *Human Aspect Of Urban Form*, Pergamon Press, New York.
- Setijoko, B. (1997), *Arsitek dan Penentu Kebijakan*, dalam *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Editor Eko Budiharjo, Djembatan, Jakarta.
- Silas, J. (1993), *Housing Beyond Home*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Arsitektur FTSP, ITS Surabaya, Surabaya.
- Silas, J. (2002), *Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah*, Makalah Pelatihan Amdal - A, ITS, Surabaya.
- Sugandhy,A. (1991), *Keanekaragamam Pemukiman Golongan Berpenghasilan Rendah di Kota Dati II Malang*, JIIS No.1, PAU-IS-UC dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Turner, J.F.C (1972), *Freedom to Build*, The Mcmilland, New York.
- Wiseso, B.R (2000), *Menuju Desain yang Sadar Lingkungan dengan Konsep Sustainable Architecture: Sebuah Pendekatan Ekologi*, Kilas, Jurnal Arsitektur FTUI Volume 2 No. 1/Januari, FTUI, Jakarta.